

CAPAIAN DAN PRESTASI PARA GUBERNUR DI BUMI GORA, JANGAN SAMPAI HILANG !



Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi (kanan)

Beberapa tahun terakhir ini siapa yang tak kenal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi yang terletak di kawasan kepulauan nusa tenggara ini menjadi trending topic dan melesat dengan capaian prestasi tidak hanya sebagai kawasan investasi baru ataupun pengembangan pariwisata yang mampu memikat turis dunia dan domestik saja tetapi juga mampu mengangkat masyarakat NTB dalam mencapai tujuan pembangunan millennium (MDGs) berturut-turut sejak tahun 2013 hingga 2015.

Capaian prestasi tersebut, tentunya tidak terlepas dari sosok kepemimpinan sang Gubernur TGH. Muhammad Zainul Majdi atau lebih populer di sapa dengan Tuan Guru Bajang (2008 – 2018 nanti). Asli putra Lombok dari pasangan HM. Jalaluddin SH, seorang pensiunan birokrat pemda NTB dengan Hj. Rahun Zainuddin Abdul Madjid, putri dari TGH. Zainuddin Abdul Madjid (Tuan Guru Pancor) seorang pendiri organisasi Islam Nadlatul Wathan. Tuan Guru Bajang bahkan sempat dinobatkan sebagai Gubernur termuda di Indonesia (berusia 32 tahun, saat pelantikan tahun 2008 lalu).

Pria kelahiran Pancor-Selong 13 Mei 1972 ini sebelumnya sempat menduduki Anggota DPR dari FPBB periode 2004 s.d. 2009. Kemudian hijrah ke Partai Demokrat dan kini menjadi Ketua DPD Demokrat di Provinsi NTB. Mengecap pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo sejak S1, S2 hingga S3 ini, menyediakan waktunya untuk mengemukakan sejumlah pandangan tentang berbagai hal dalam membangun 'bumi gora'—istilah kependekan dari 'gogo rancah' sebagai upaya mengembangkan sumber daya alam di wilayahnya termasuk harapan kedepan mengenai lembaga kearsipan kepada Wartawan Majalah

Arsip Bambang P. Widodo. Di sela-sela audiensi rombongan ANRI yang dipimpin Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan DR. Andi Kasman, SE, MM ke Gubernur sebelum berlangsungnya acara Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional Arsiparis di kota Mataram tanggal 19 s.d. 20 April 2016. Dalam awal sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dari ANRI terhadap kota Mataram sebagai tempat penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional Arsiparis, semoga ini bentuk apresiasi nyata dalam memperkuat ketahanan nasional kita.

Berikut redaksi sajian petikan wawancaranya:

Apa visi kepemimpinan Bapak dalam membangun masyarakat NTB sehingga mampu menempatkan Provinsi NTB sebagai salah satu provinsi yang berhasil mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) ?

Saya memahami bahwa pembangunan itu merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi meskipun ada perbedaan visi dan pendekatan dari pemimpin sebelumnya, setiap pemimpin yang baru pasti membangun fondasi dari pemimpin sebelumnya. Artinya, dalam membangun suatu daerah tidak terlepas dari proses kontinuitas dari pemimpin sebelumnya. Visi saya pada tahun 2008 saat terpilih menjadi Gubernur periode 2008 s.d. 2013 adalah membangun masyarakat NTB yang 'beriman' dan 'berdaya saing'. Beriman maksudnya disini tidak terlepas dari nuansa religius di NTB yang sangat kuat dan fakta sosial yang

nyata yaitu kehidupan keberagaman (taat beragama dan berbudi pekerti luhur) itu telah menjadi modal sosial bagi masyarakat NTB. Kemudian berdaya saing, bahwa harus diakui selama ini pembangunan SDM disini perlu ditingkatkan sehingga dengan program pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan daya saing secara global di segala aspek ipoleksosbudhankam.

Visi ini kemudian saya lanjutkan pada periode berikutnya tahun 2013 s.d. 2018 dengan menambah dari visi sebelumnya, yaitu dengan 'berbudaya' dan 'sejahtera'. Berbudaya disini maksudnya bahwa nilai-nilai budaya telah berperan sebagai panduan/pedoman yang diformalkan dalam bentuk awit-awit di desa-desa ternyata sangat efektif di dalam membentengi perilaku dan budaya asing sehingga kehidupan berbudaya pun perlu dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk dijadikan modal sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB. Semuanya, pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, disini orientasi kita tidak hanya membangun infrastruktur saja tetapi pembangunan yang dilakukan harus memberikan korelasi langsung bagi kesejahteraan masyarakat NTB. Jadi memasuki periode kedua kepemimpinan saya ini, mempunyai visi untuk pembangunan Provinsi NTB adalah untuk mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera.

Lantas program unggulan apa saja dari kepemimpinan Bapak yang sudah dilaksanakan?

Saya mencoba memberi prioritas pada aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan penekanan pembangunan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua hal itu berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada beberapa program kita yang telah diadopsi secara nasional, contohnya jaminan persalinan atau 'Jampersal' dimana setiap masyarakat khususnya



Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat

wanita di NTB yang melahirkan berhak mendapatkan fasilitas kesehatan pada kelas tiga secara gratis. Dan, program ini setelah dua tahun berjalan diadopsi secara nasional menjadi coverage asuransi yang diperluas menjadi jaminan kesehatan nasional (Jamkesmas). Program jampersal kami telah mampu menekan angka kematian ibu dan bayi lahir, itu artinya manfaat program ini mampu berkorelasi terhadap semakin lamanya usia hidup seseorang. Pada bidang pendidikan, beberapa program juga telah mampu menjadikan provinsi NTB berstatus top mover atau percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat bagus dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 lalu. Peningkatan IPM ini tentunya menjadi program unggulan kita yang pertama karena mampu meningkatkan usia harapan hidup.

Program unggulan kedua, tidak terlepas dari karunia Allah SWT dengan melimpahnya sumber daya alam di wilayah NTB. Ada komoditas yang bisa tumbuh dan memberikan nilai ekonomi yang baik. Komoditas ini bukan karena komoditas ekspor tetapi komoditas yang sering digunakan masyarakat Indonesia atau dikonsumsi dalam negeri, seperti: padi,

jagung, rumput laut, dan sapi. Bahkan untuk kebutuhan konsumsi lokal, sapi, jagung, dan rumput laut, kami meningkatkannya dengan istilah PIJAR telah berhasil menciptakan ketahanan daerah dan berimplikasi terhadap indeks rasio gini di NTB paling rendah di bawah gini rasio nasional sehingga mampu memperlihatkan adanya pengurangan kemiskinan. Saat ini selain PIJAR tadi kita punya produk tambahan, yaitu tebu. Kita punya basis industri gula yang siap berproduksi bula Agustus nanti. Dengan demikian, kalau lima komoditas strategis nasional yang ditetapkan pemerintah (beras, jagung, kedelai, tebu/gula, dan sapi) semuanya itu ada di NTB. Otomatis ini merupakan anugerah yang patut disyukuri dimana NTB telah menjadi bagian dalam mendukung ketahanan ekonomi bangsa.

Program yang ketiga, yang sedang digalakkan sejak tahun 2015 ini adalah membangun pariwisata dengan membangun konsep halal tourism atau wisata halal yang bertujuan untuk menjaring wisatawan dari Timur Tengah yang selama ini belum terserap/terjaring oleh pariwisata nasional. Dimana wilayah Lombok dan Sumbawa merupakan wilayah

destinasi baru di NTB sehingga perlu dilakukan penataan ulang, dengan tetap mempertahankan keaslian dan kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan dukungan Kementerian Pariwisata maka NTB telah menjadi provinsi pelopor dalam membangun destinasi 'halal tourism' sekaligus memberi nilai tambah dalam pengembangan ekonomi.

Program unggulan selanjutnya adalah membangun infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. Provinsi NTB faktanya adalah salah satu dari tujuh provinsi kepulauan di Indonesia yang menjadi wilayah konektivitas keterhubungan dari satu titik ke titik lainnya. Oleh karena itu, kita sedang membenahi infrastruktur secara besar-besaran, baik itu infrastruktur transportasi (matra darat, udara, dan laut), infrastruktur sumber daya air, dan infrastruktur sanitasi sebagai kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama untuk meningkatkan anggaran dengan menggunakan skema multi years sehingga provinsi NTB mendapatkan penghargaan dari pusat di dalam pembangunan 'kebinamargaan'.

Apakah program-program prioritas tersebut telah terdokumentasikan oleh Pemprov NTB sehingga dapat memacu daerah lain untuk mencontoh keberhasilan pembangunan di NTB?

Program prioritas tersebut tentunya sudah sesuai dengan RPJM Provinsi NTB sehingga keberhasilan yang diraih provinsi NTB ini bukan terjadi begitu saja tetapi melalui proses perencanaan yang matang dan terukur yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan kata lain keberhasilan ini merupakan bentuk kolektif dari seluruh masyarakat NTB untuk Indonesia. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa saat ini setiap 1,2 juta ton beras hasil produksi kita lebih dari 50% telah dimanfaatkan oleh beberapa provinsi lain di Indonesia. Bahkan ini sudah berlangsung selama 10 tahun, dimana NTB telah menjadi

pemasok kontributor utama dalam ketercukupan kebutuhan beras di Indonesia. Demikian pula untuk Sapi Bali, meskipun namanya Sapi Bali tapi sebenarnya bibit terbaiknya berasal dari Lombok, karena bibit dari Lombok sejauh ini tidak ada satupun terkena wabah/penyakit genetik sehingga menjadi incaran bagi provinsi lain untuk mendapatkan bibit sapi dari Lombok. Ini yang banyak masyarakat kita tidak tahu, termasuk dalam pengembangan produk mutiara laut selatan yang diolah di negara Jepang, Korea, dan Hongkong, untuk kemudian dipasarkan di negara-negara eropa. Kita mencoba terus kembangkan dan menciptakan daya tumbuh atau istilah kita adalah Hilirisasi Produk Lokal. Langkah ini merupakan cara kami untuk memberikan bukti melalui program-program unggulan dan prioritas bahwa provinsi NTB senantiasa memberikan yang terbaik buat Indonesia.

Bagaimana dengan upaya peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTB ?

Upaya peningkatan pelayanan publik tetap menjadi prioritas dalam mewujudkan reformasi birokrasi khususnya dalam tata kelola pemerintahan yang baik di NTB. Kalau kita bicara tentang KPK, mohon maaf terpaksa saya sebutkan bahwa di masa-masa awal KPK salah seorang Bupati di NTB terkena musibah menjadi pasien di KPK dan kemudian setelah itu ada lagi pejabat lainnya. Hal ini kalau dibiarkan tentunya berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan di NTB. Berkaca dari itulah kita mencoba membangun kredibilitas pemerintahan dengan membangun transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan partisipasi masyarakat. Alhamdulillah pada tahun 2014 di Provinsi NTB ini telah mendapat penghargaan sebagai peringkat pertama dalam keterbukaan informasi publik se Indonesia. Inovasi-inovasi tersebut bagian dari reformasi birokrasi atau bagian dari upaya peningkatan

pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam tata kelola keuangan kita, selama empat tahun berturut-turut ini telah mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dimana tahun-tahun sebelumnya lebih banyak disclamer nya.

Tahun lalu, mulai dari 2014 kita punya program inovasi kampung media yang telah menjadi top nine (satu dari sembilan bentuk inovasi pelayanan publik terbaik se Indonesia). Untuk tahun ini juga ada program inovasi pelayanan publik kita yang masuk inovasi top 99 pelayanan yaitu program 'temukan arsip dalam tiga menit', bahkan dalam proses temukan arsip tersebut telah terjadi peningkatan atau perbaikan hingga menjadi 'temukan arsip dalam satu menit' dan kita berharap dapat masuk top nine lagi. Program 'temukan arsip dalam satu menit' ini merupakan kelanjutan dari upaya penataan arsip khususnya di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi. Jadi teman-teman disini telah membangun suatu direktori arsip dalam bentuk aplikasi e-arsip NTB yang dapat dimanfaatkan sebagai akses masuk untuk menemukan arsip. Inovasi ini telah teruji melalui berbagai kompetisi baik tingkat lokal maupun nasional, salah satunya dalam Kompetisi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2016, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2016). Inovasi ini telah berhasil menyisihkan 2.471 inovator lain dari seluruh Indonesia

Mengenai inovasi 'Temukan Arsip Dalam Tiga Menit yang kemudian berubah Menjadi Satu Menit ini baru sebatas di lingkungan pemerintah provinsi, bagaimana bapak memperluas jangkauan inovasi ini dengan melibatkan lembaga kearsipan sehingga dapat diterapkan juga di lingkungan SKPD dan kabupaten/kota?

Itu telah menjadi target saya, bahwa tahun 2016 sistem ini harus teradopsi di lingkungan SKPD dan



Tim Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB sedang memaparkan program “Temukan arsip dalam satu menit”

juga kabupaten/kota. Kita akan koordinasikan dengan melibatkan kepala lembaga kearsipan atau kepala Badan baik di provinsi ataupun kabupaten/kota sehingga mampu memotivasi untuk senantiasa memberikan pelayanan publik melalui akses informasi yang mudah dan cepat, serta dapat dipertanggungjawabkan validitasnya kepada masyarakat. Setidaknya program tersebut telah mengangkat harkat para pekerja di bidang kearsipan, tidak hanya bagi kami tetapi juga bagi instansi lain dalam upaya menampilkan inovasi pelayanan publik khususnya di bidang kearsipan.

Apa ada kebijakan khusus dari Bapak terhadap lembaga kearsipan di NTB ini ?

Sejauh ini kita memiliki depo arsip yang masih layak dan nanti kita coba melengkapi jika ada kekurangan terutama dari segi pengamanannya, misalnya dengan menambah CCTV. Untuk arsip yang di bawah 10 tahun yang masih tersimpan di SKPD akan segera kita pastikan mendapatkan yang baik. Disini peran Badan Arsip sebagai lembaga kearsipan daerah untuk mengontrol, membina, sekaligus

penanggungjawab penyelenggaraan kearsipan di daerah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menambah Arsiparis kita, karena itu perlu ada langkah-langkah implementatif yang cepat untuk pengadaan Arsiparis ini, minimal kebutuhan Arsiparis pada setiap SKPD dapat teratasi secara bertahap sampai dengan terpenuhinya jumlah Arsiparis yang ideal sehingga arsip-arsip hasil penyelenggaraan pemerintahan dapat terkelola dengan baik.

Kita berharap capaian dan prestasi yang diperoleh Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Bapak ini dapat terdokumentasikan sehingga menjadi memori kolektif daerah untuk generasi mendatang ? Mungkin ada program unggulan bagi lembaga kearsipan di NTB ini dalam waktu dekat ?

Saya melihat arsip itu penting terutama dari sisi proses penciptaan dan pemanfaatan, bahwa yang diarsipkan itu hasil dari pemikiran, kebijakan, pergulatan, institusi pemerintah dan masyarakat itu merupakan bagian dari sejarah dan kekayaan kita, jadi kalau itu hilang maka hilanglah sebagian kekayaan kita. Dari situ saya

menganggap arsip sangat penting dan bernilai sejarah bahwa rekaman sejarah kita merupakan jati diri kita sebagai suatu entitas daerah ataupun bangsa. Karena itu saya perintahkan Kepala Badan bekerjasama dengan Biro Humas untuk memprioritaskan dan merancang pembangunan memori kolektif dari para Gubernur dan pemerintahan, bukan hanya sejak kepemimpinan saya saja tetapi juga Gubernur sebelumnya sehingga pencapaian prestasi para Gubernur di Bumi Gora ini jangan sampai hilang. Saya berharap program pembangunan Memorial Gubernur tersebut dapat terwujud pada tahun 2018 dan menjadi program unggulan bagi lembaga kearsipan kami ini. Tentunya, kita akan melakukan riset kajian terhadap memorial para Gubernur terlebih dahulu dengan bekerja sama dengan ANRI, kemudian menyiapkan SDM nya, dan dukungan anggaran untuk membangun Memorial Gubernur tersebut. (BPW)